



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PERHUBUNGAN



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)**

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH DATAR**
Tahun Anggaran
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridho dan karuniaNya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak terkait sehingga dimasa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien, serta dapat mendorong terciptanya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada prinsi-prinsip Good Governance.

Kami menyadari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini jauh dari kesempurnaan disebabkan berbagai keterbatasan, baik keterbatasan kemampuan, waktu dan sebagainya. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, terimakasih.

Batusangkar, Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KAB.TANAH DATAR,



YUSNEN, S.Ag, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701026 199103 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI Hal

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 1
- B. Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah... 10
- C. Sistematika Pelaporan..... 11

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis (Renstra)..... 13
- B. Prioritas Daerah..... 19
- C. Perjanjian Kinerja..... 19
- D. Rencana Kerja dan Anggaran..... 21

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja..... 28
- B. Analisis Capaian Kinerja..... 28
- C. Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran.... 58

BAB IV : P E N U T U P

- A. Kesimpulan..... 61
- B. Saran..... 61

LAMPIRAN : Perjanjian Kinerja Tahun 2024

SK IKU

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN guna untuk tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance)

Untuk penjabaran lebih lanjut dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan yang merupakan salah satu unsur pelaksana. Pemerintah Daerah sebagai pembantu Kepala Daerah. Dinas Perhubungan melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

a. TUGAS POKOK

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. FUNGSI

1. perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah,
2. pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah,
4. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar hanya melaksanakan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

c. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan
 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- d. Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 1. Seksi Keselamatan dan Pengembangan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.

Tugas Pokok dan Fungsi Esselon II dan III Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas, melaksanakan urusan pemerintah dibidang Perhubungan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan antara lain:

1. perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah,
2. pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah,
4. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretaris

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana,
- d. pengelolaan barang milik Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan

- 1. Bidang lalu lintas dan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- 2. Bidang lalu lintas dan angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kabid Keselamatan Sarana dan Prasarana

- 1. Bidang prasarana dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi.

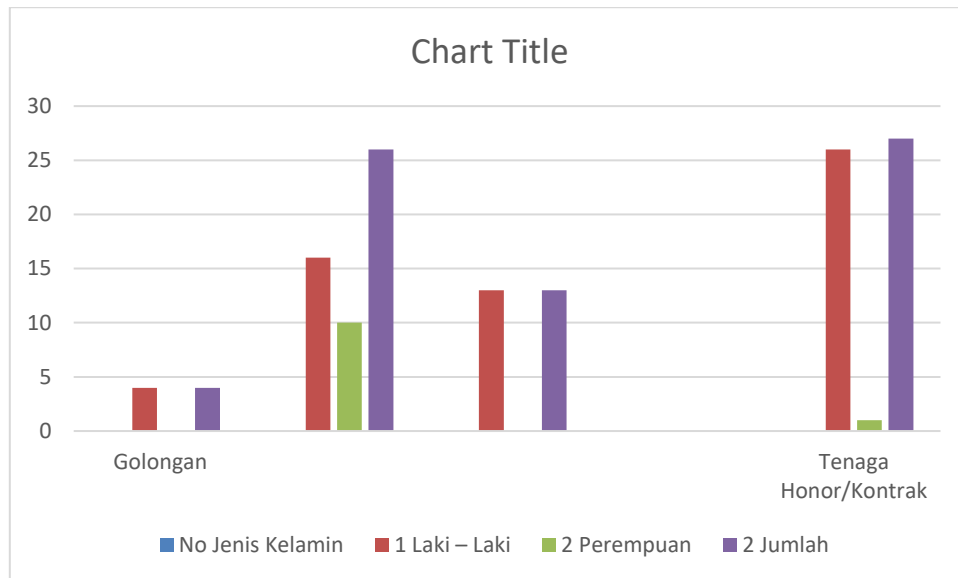
2. Bidang prasarana dan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh faktor lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal, salah satu yang mempengaruhi adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan melaksanakan tugas dan fungsi (Tupoksi) organisasi itu sendiri. Saat ini pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, terdapat 43 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 24 Orang Pegawai Honorer/Kontrak/THL dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.c.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Golongan				Tenaga Honor/Kontrak
		IV	III	II	I	
1.	Laki – Laki	4	16	13	0	25
2.	Perempuan	0	10	2	0	0
	Jumlah	4	26	15	0	25

Dapat dilihat seperti grafik berikut ini :



Tabel 1.c.2

Data pegawai berdasarkan pembagian per Bidang.

NO	UNIT KERJA	PNS	HONORER	JUMLAH
1.	Sekretariat	10	5	15
2.	Bidang TKSP	14	16	30
3.	Bidang Lalu Lintas	21	3	24
	Jumlah	43	24	

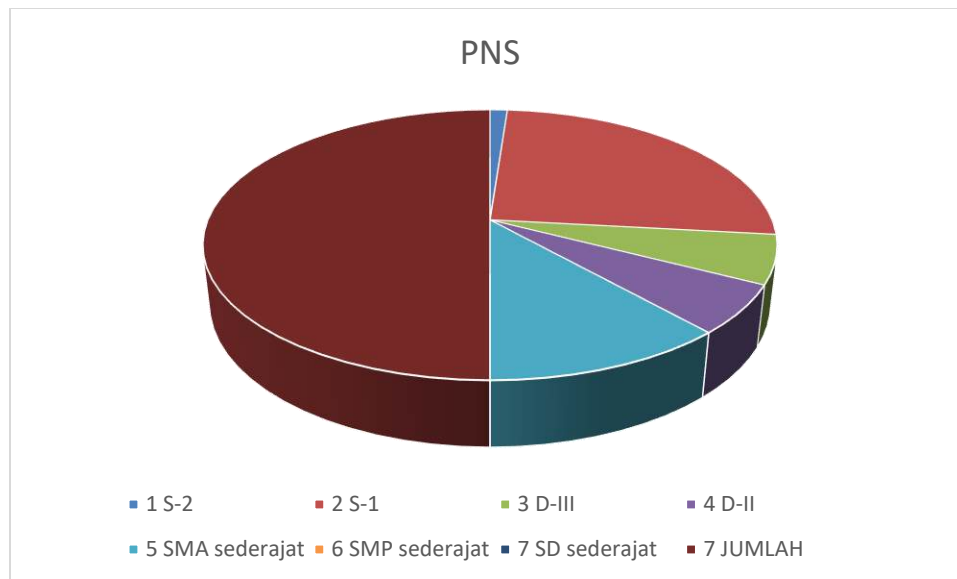
Tabel 1.c.3

Data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	NON PNS	JUMLAH
1.	S-2	4	-	3
2.	S-1	25	2	27
3.	D-III	7	-	7
4.	D-II	4	-	4
5.	SMA sederajat	9	6	15

6.	SMP sederajat	-	7	1
7.	SD sederajat	-	10	2
	JUMLAH	43	24	67

Dapat dilihat seperti grafik berikut ini :



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Perhubungan dilengkapi dengan sarana dan prasarana aset operasional yang terkait langsung dengan kegiatan, disamping tanah dan gedung bangunan ada asset yang sangat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Adapun jumlah asset yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.1
Asset Dinas Perhubungan

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	4 Unit	
2	Kendaraan Roda 2	4 Unit	
3	Meja	37 Buah	
4	Lemari	9 Unit	
5	Lap Top	14 Unit	
6	Komputer	3 Unit	
7	Printer	9 Unit	
8	Kursi	76 Buah	

Untuk mewujudkan pemerintahan yang "Good Governance" maka fungsi pelayanan dituntut untuk ditingkatkan kualitas nya secara terus menerus sebagaimana diamanatkan dalam UU no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam tugas dan fungsi pelayanan di Dinas Perhubungan kabupaten Tanah Datar juga dihadapkan pada persoalan utama (strategic issued) ;

1. Masih terbatasnya tenaga pelayanan untuk pengamanan lalu lintas dan angkutan
2. Penempatan personil di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar harus yang mempunyai kompetensi dan mampu bekerja secara profesional dan tidak terkesan pegawai Dinas Perhubungan Pegawai Buangan.
3. Keterbatasan anggaran, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar belum bisa secara optimal melaksanakan pelayanan.
4. Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi antara lain ; Transportasi, Halte, Rambu, Marka jalan, Guard Rail, Traffic Light , dan belum adanya ATCS di kabupaten Tanah Datar.

5. Kesejahteraan aparat Pegawai di Dinas Perhubungan berupa pemberian Tunjangan Khusus dan penghargaan atas resiko dalam melaksanakan tugas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar mendapat amanah untuk melaksanakan SPM dari Kementerian Perhubungan. Khusus di Daerah Kabupaten Tanah Datar, Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan baru 1 (satu) Pelayanan Dasar yaitu Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), karena untuk Pelayanan Pelayaran, Penerbangan dan Kereta Api belum ada potensi yang dimiliki daerah sampai saat ini, untuk digunakan memberikan pelayanan kepada masyarakat, mudah-mudahan untuk kedepan hal ini akan dapat dilaksanakan sejalan dengan perkembangan transportasi di Indonesia

B. PERAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada RPJMD 2021-2026, visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Tanah Datar untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang madani berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”**. Untuk mewujudkan visi tersebut Kabupaten Tanah Datar menetapkan 6 misi dan 10 agenda prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM.
3. Meningkatkan sumberdaya yang berkualitas dan berdaya saing
4. Pembangunan pariwisata yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar mendukung misi 6 ini yaitu peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas.

10 (Sepuluh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun
2. Mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah
3. Meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi
4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan pada wilayah yang jauh ibukota kabupaten
5. Meningkatkan kesejahteraan guru TPA dan Tahfiz di Tanah Datar
6. Satu nagari satu *event* untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari
7. Peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan Organisasi Keagamaan
8. Membangun jaringan telekomunikasi
9. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan tenaga honorer
10. Perbaiki irigasi

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika penulisan yang mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan informasi umum tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar serta uraian singkat Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan gambaran mengenai visi, misi organisasi sesuai dengan rencana strategis yang dilengkapi dengan matriks tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target jangka menengah yang dibagi pertahun selama periode renstra, bab ini juga berisi prioritas daerah, perjanjian kinerja dan rencana kerja beserta anggaran.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi uraian capaian indikator kinerja organisasi tahun 2024. Selain itu disajikan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV Penutup

Bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Dinas Perhubungan kabupaten Tanah Datar dalam jangka panjang.

Mengacu pada konsep visi di atas dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis ini. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar menetapkan Visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KENYAMANAN TRANSPORTASI DI KABUPATEN TANAH DATAR“

Penjelasan dari Visi :

Terwujudnya kenyamanan transportasi adalah rasa aman dan tenteram yang dirasakan pengendara dan penumpang angkutan umum baik dalam pelayanan maupun dalam saat dikendaraan.

Berdasarkan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar ditetapkan 3 Misi yang akan dicapai pada tahun 2021 – 2026.

Misi, yang telah dirumuskan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mencapai misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode tahun 2021 – 2026, seperti pada tabel 2.B.1

Tabel 2.B.1 Tujuan dan sasaran strategis

NO	TUJUAN	SASARAN	Strategi
1.	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas
		Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	Meningkatnya kendaraan yang laik jalan
			Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya tata Kelola birokrasi yang akuntabel	Peningkatan Predikat akuntabilitas kinerja OPD
		Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang akan dicapai dalam waktu tertentu dan target tertentu. Tujuan merupakan pernyataan visi yang dijabarkan dalam misi organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan, sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan Adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dan keberhasilan dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam jangka menengah (5 Tahunan) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase Penyediaan alat kelengkapan jalan	66.25	71,71	71.74	71.76	71.78	71.80
		Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	Persentase kendaraan yang layak jalan	66,25	94,60	95,00	95,50	96,00	96,50

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (86,00)	Baik (95,00)	Sangat baik (95,20)	Sangat baik (95,40)	Sangat baik (95,60)	Sangat baik (95,80)
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya tata Kelola birokrasi yang akuntabel	Predikat akuntabilitas kinerja OPD	BB (70)	BB (71)	BB (72,50)	BB (72)	BB (72,50)	BB (73)
		Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	-	1	1	1	1	1

3. Sasaran dan Program

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, Dinas Perhubungan menetapkan program untuk menggambarkan target yang akan dicapai dalam waktu satu tahun, seperti terlihat pada tabel 2.C.1

Tabel 2.C.1 Program Dinas Perhubungan Kab. TD
berdasarkan sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	➤ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Subkegiatan: a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

2.	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	➤ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Kegiatan: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Subkegiatan: a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. Kegiatan: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Subkegiatan: Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C 3. Kegiatan: Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Subkegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya tata Kelola birokrasi yang akuntabel	➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Subkegiatan: a. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Subkegiatan: a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Subkegiatan: a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan d. Fasilitas Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkegiatan:

		a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkegiatan: a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
--	--	---

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah , Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar yang telah ditetapkan.

Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja utama berikut dapat tergambar dalam tabel 2.D.1

Tabel 2.D.1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024
1.	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	71,76 %
2.		Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	100%
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya tata Kelola birokrasi yang akuntabel	BB (72,00)

4.		Terwujudnya inovasi berkelanjutan	1
----	--	-----------------------------------	---

B. Prioritas Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar mendukung misi 6 ini yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dinas Perhubungan Kab.Tanah Datar dalam upaya mewujudkan 10 Agenda Prioritas Pembangunan Daerah bersinergi/menjadi pendukung dalam mensukseskan agenda dengan cara antara lain :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan demi terwujudnya kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas
2. Peningkatan Kelancaran berlalu lintas berupa pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada area titik keramaian.
3. Peningkatan pelayanan di bidang perhubungan yang berkaitan dengan 10 agenda prioritas pembangunan daerah.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Saat Ini/Capaian Tahun Sebelumnya	Target	Kenaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	1. Persentase penyediaan alat kelengkapan jalan	78,38 %	71,76 %	6,62
2.	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	1. Persentase kendaraan angkutan umum	77,15 %	75%	2,15

		dan barang yang layak jalan			
		2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (95,83)	Baik (95,40)	0,48
3.	Meningkatnya tata kelola birokrasi yang akuntabel	Predikat akuntabilitas kinerja OPD	B (70,60)	BB (72,50)	0,43
4	Terwujudnya Inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	-	1	1

Pada tahun 2024 untuk target Pengukuran Kinerja mengalami perubahan dengan pagu anggaran awal sebesar Rp 18.394.340.446,- menjadi Rp 18.597.986.802,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran sesudah Perubahan (Rp)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	13.118.152.160	13.203.952.160
	a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.582.317.650	12.523.117.650
	b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.	57.136.300	57.136.300
	c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.	383.800.000	398.800.000
	d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	59.635.900	79.635.900
	e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	30.262.310	120.262.310
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.276.188.286	5.394.034.642

	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.104.000	13.104.000
	b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.818.539.986	4.902.186.342
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.315.500	88.015.500
	d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeri	155.984.400	146.464.400
	e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	249.264.400	244.264.400

D. Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas diperlukan upaya dan langkah strategis, dengan telah ditetapkan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar yang telah ditetapkan dalam Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024. Untuk mendukung kegiatan program pembangunan rencana kerja telah dialokasikan pembiayaan melalui rencana kerja dan anggaran Tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 yang berisi program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah yang tertuang dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat 3 bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungannya masing-masing.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah kabupaten Tanah Datar, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, penyusunan rencana kerja , anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai

dengan dokumen rencana strategis masing-masing Satuan kerja perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar telah menyusun penetapan kinerja sebagaimana tercantum dalam Laporan Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar seperti pada tabel dibawah ini :

No	Program/Kegiatan	Rencana Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)
	URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		18.597.986.802
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5.394.034.642
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13.104.000
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Induk dan DPA perubahan Dishub	8.104.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan LKPJ, LPPD dan LKjIP Dishub	5.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.902.186.342
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan 45 orang ASN Dishub	4.894.149.342
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan semester dan akhir tahun keuangan dan asset	8.037.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		88.015.500

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat listrik kantor dalam 1 tahun	1.517.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dalam 1 tahun	18.738.500
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun	5.556.000
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya d kunjungan tamu dalam 12 bulan	2.504.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan	59.700.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		146.464.400
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materai dan gaji THL Adm 2 orang	47.800.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran tagihan air, telepon dan listrik 1 tahun,	65.500.000
3	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Penyediaan alat kebersihan dan gaji THL 1 orang	33.164.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		244.264.400
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan 4 mobil dinas, 1 bus, 4 kendaraan roda 2 dan pembayaran pajak kendaraan	212.400.000

2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan kerja kantor	3.500.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung Kantor dan gaji 1 org THL keamanan	28.364.400
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		13.203.952.160
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		9.266.293.218
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan PJU 4 paket, sesuai dengan aturan yang berlaku	286.300.000
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Rambu 32 unit, Trafficlight 6 unit, Warning light 3 unit, PJU 400 unit, gaji THL 2 PJU 3 orang Tagihan Listrik PJU 1 tahun	12.236.817.650
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		57.136.300
1	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya pemeliharaan 1 unit terminal (jati), tersedianya gaji 2 orang THL K3 Terminal	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		398.800.000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan gaji THL juru parkir 14 orang	398.800.000
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		104.635.900
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan PKB selama 1 tahun	79.635.900

2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Telaksananya kalibrasi dan Pemeliharaan 13 unit Alat PKB	25.000.000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		120.262.310
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengaturan Lalin dan Pengamanan Agenda Pemerintah Daerah dala 12 bulan	120.262.310

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penghitungan pencapaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai instansi di akhir tahun anggaran pada tingkat indikator hasil (outcome). Selanjutnya terhadap capaian kinerja sasaran yang tidak memenuhi target rencana yang telah ditetapkan dilakukan analisa sesuai kondisi makro dan asumsi yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkompeten terhadap laporan ini dapat memahami secara utuh berbagai kelemahan dan kekuatan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan misinya guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi yang ditetapkan pada instansi dan data eksternal berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengukuran data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil yang dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur penghematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok kinerja kegiatan.

2. Tingkat capaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengukuran tingkat capaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan fomulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Berdasarkan hasil perhitungan formulir PKK dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan serta kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Dalam mengukur nilai capaian Kinerja terhadap masing-masing kinerja kegiatan, dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi setiap indikator kinerja (***in put, out put, dan out come***). Sementara untuk pengukuran kinerja, terutama keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran dan keberhasilan yang dicapai organisasi, digunakan skala pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
Diatas 100	Sangat memuaskan
85 – 100	Sangat baik
70 – 85	Baik
55 – 70	Sedang
0 – 55	Kurang baik

Kriteria penilaian di atas, digunakan sebagai standar penilaian tingkat capaian baik indikator kinerja keluaran (**out put**), hasil (**out come**), kegiatan/sasaran maupun kinerja Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Misi V dan VI :

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian %		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(10)
1. Persentase penyediaan alat kelengkapan jalan	71,71%	71,74%	71,76 %	71,53%	78,38%	76,58%	99,75	109,25	106,71
2. Persentase kendaraan angkutan umum dan barang yang layak jalan	94,60 %	75,00 %	75,00 %	104,58 %	77,15 %	75,21%	110,55	102,86	100,28
3. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik Sekali (94,99)	Baik Sekali (95,20)	Baik Sekali (95,40)	Baik Sekali (95,68)	Baik Sekali (95,83)	Baik sekali (97,049)	100,72	100,66	101,73
4. Predikat akuntabilitas Kinerja OPD	BB (71,00)	BB (72,50)	BB (72,00)	B (66,51)	B (68,80)	BB (70,60)	93,67	94,89	98,05
5. Terwujudnya inovasi berkelanjutan	1	1	1	1	1	1	100	100	100
Rata- Rata Capaian 2024									101,36

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 ada 3 sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 2 (program) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan, 22 (Dua puluh

Dua) subkegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp. 18.597.986.802,- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah)**. Setelah dilakukan analisa pencapaian kinerja sasaran secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja fisik rata-rata sebesar 96.67%. Dengan capaian kinerja sebagai berikut (terlampir):

Analisa Capaian Kinerja untuk setiap sasaran strategis dapat di uraikan sebagai berikut:

Capaian kinerja sasaran 1 :

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian %		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(10)
1. Persentase penyediaan alat kelengkapan jalan	71,71 %	71,74 %	71,76 %	71,53 %	78,38 %	76,58 %	99,75	109,25	106,71

I. Sasaran I: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan, telah dapat direalisasikan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Output subkegiatan ini berupa Pengadaan Penerangan Jalan Umum sebanyak 7 unit yang merupakan pokir anggota DPRD dan 18 unit merupakan arahan pimpinan.

2) Subkegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Output subkegiatan ini berupa pemeliharaan alat kelengkapan jalan dengan terpeliharanya trafficligh sebanyak 3 unit dan Penerangan Jalan Umum sebanyak 1039 unit.

b. Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

1) Subkegiatan : Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C

Output subkegiatan ini berupa pemeliharaan 1 unit terminal dan pembayaran 2 orang K3 Terminal.

Sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator Kinerja:

1. Persentase Penyediaan Alat kelengkapan Jalan (target kinerja =71,76)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana terpasang Tahun 2024}}{\text{Jumlah kebutuhan Sarana dan Prasarana Tahun 2024}} \times 100 \% \\
 &= \frac{425}{555} \\
 &= 76,58\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja : } & \frac{76,58}{71,76} \times 100 = 106,72 \%
 \end{aligned}$$

No	Sarana dan Prasarana	Kebutuhan Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Pengadaan							Yang dibutuhkan tahun 2024
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah	
1	Pengadaan Rambu-Rambu	271	185	6	-		-	-	191	59
2	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	802	92	0	-	-	-	-	92	342
3	Perlengkapan									
	- Trafficone	194	64	0	-	(34)	-	-	30	60
	- Cermin Cembung	38	23	0	-	-	-	-	23	10

	- Roadbarrier	180	0	0	-	-	-	-	0	50
4	Pembangunan Halte (sarana prasarana pendukung jalan)	26	6	1	-	-	-	-	6	14
5	Penerangan Jalan Umum	320	0	20	38	25	-	-	83	20
	Jumlah						-	-	425	555

Realisasi Persentase penyediaan alat kelengkapan jalan pada tahun 2024 sebesar 76,58 % sedangkan pada tahun 2023 sebesar 78,38 % sudah baik tetapi ada item yang mengalami penurunan sebesar 1,8 % dikarenakan adanya salah satu sarana dan prasarana berupa Trafficone yang jumlahnya berkurang hal ini disebabkan karena sudah habis terpakai dimakan usia (lapuk) terjemur matahari. Tahun 2024 terdapat anggaran Pokir DPRD yang ditempatkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar untuk penyediaan alat kelengkapan jalan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) biasa sebanyak 7 unit dan PJU Tata Surya (Solar Cell) yang merupakan arahan pimpinan sebanyak 18 unit , total PJU terpasang sebanyak 25 unit dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi		Jenis PJU (unit)	
	Kecamatan	Nagari	Biasa	TS (Cell)
1	Batipuh	Batipuh Baruah	7	
		Batipuh Ateh		3
2.	Rambatan	III Koto		2
3.	Pariangan	Batubasa		2
4.	Tj. Baru	Tanjung Alam		1
5.	Lintau Buo Utara	Tj. Bonai		2
		Balai Tengah		2

		Tepi Selo		2
		Lubuk Jantan		2
		Batu Bulek		2
		Jumlah	7	18



Foto.1 pengadaan PJU

Pada tahun 2024 ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar mendapat bantuan teknis (Bantek) dari kementerian perhubungan berupa:

No	Jenis Bantek	Lokasi	Jumlah
1	PJU Tata Surya 2 unit	Lapangan Cindua Mato	2 unit
2	RPPJ 2 unit	Lapangan Cindua Mato dan Manunggal	2 unit
3	Rambu Biasa (10 Unit)	Kedai Makdes	1 unit

		Simp. Balai Jumat	1 unit
		Simp. 4 Kapuah	2 unit
		Simpang TPA	1 unit
		Mesjid Muhammadiyah	1 unit
		Simpang 3 Ambacang	1 unit
		SD Komplek	1 unit
		SD depan lap. Cindua M	1 unit
		SMA 1 Batusangkar	1 unit

Item di atas sudah terpasang di lokasi yang dimaksud, namun belum ada naskah hibah dari Kementerian Perhubungan ke Kabupaten Tanah Datar.



Foto 2. Bantuan Teknis (Bantek) Kementerian

Permasalahan:

1. Masih tingginya angka penerangan jalan umum (PJU) kabupaten yang tiang listriknya ilegal /tidak termeterisasi sehingga menyebabkan tinggi pula angka tagihan listrik yang harus dibayar oleh Pemkab. Tanah Datar.
2. Kebutuhan perlengkapan jalan berupa Trafficone dan Road barrier yang selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak pernah pengadaan, mengingat tata kota batusangkar yang sangat membutuhkan dua item di atas.
3. Ada beberapa perlengkapan jalan yang hilang pasca bencana banjir bandang dan lahar dingin pada tanggal 12 Mei 2024 berupa 1(satu) halte dan 4 (empat) buah rambu di Manunggal Kec. Lima Kaum

Solusi:

1. Pemkab Tanah Datar kiranya dapat mengalokasikan dana untuk meterisasi PJU pada tahun 2025.
2. Pemkab Tanah Datar kiranya berkenan untuk menyediakan anggaran untuk pembelian 2 (dua) item di atas pada tahun 2025, karena trafficone dan roadbarrier merupakan alat bantu lalu lintas untuk mengarahkan, mengatur dan memberi peringatan kepada pengguna.
3. Halte merupakan sarana penting untuk kelancaran dan tertib lalu lintas, karena halte berfungsi untuk mencegah penumpang mencoba naik atau turun dalam situasi berbahaya seperti di persimpangan atau saat bus berbelok dan tidak menggunakan jalur tepi jalan, oleh sebab itu kiranya Pemkab Tanah Datar dapat membangun kembali halte yang berlokasi di Manunggal demi kelancaran lalu lintas.

Capaian kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian %		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(10)
1. Persentase kendaraan angkutan umum dan barang yang layak jalan	94,60 %	75,00 %	75,00 %	104,58 %	77,15 %	75,21	110,55	102,86	100,28
2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik Sekali (94,99)	Baik Sekali (95,20)	Baik Sekali (95,40)	Baik Sekali (95,68)	Baik Sekali (95,83)	Baik sekali (97,049)	100,72	100,66	101,73

Sasaran II : Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Darat, telah dapat direalisasikan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Kegiatan: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1) Subkegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Output subkegiatan ini berupa :

- a) penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor untuk melakukan KIR pada kendaraan angkutan umum dan penumpang. Untuk tahun 2024 seksi PKB telah melengkapi alat-alat pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh kementerian perhubungan sehingga untuk pelayanan KIR kendaraan dapat tercapai dengan maksimal karena didukung oleh peralatan yang handal dan tim pengguji yang telah terakreditasi.

- b) Diberlakukannya Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022, terhitung 1 Januari 2024 Pengujian Kendaraan Bermotor tidak lagi dipungut retribusi.
- 2) Subkegiatan: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
- Output subkegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan PKB dan Kalibrasi Alat untuk setiap tahunnya wajib dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kab. Tanah Datar dengan menghadirkan tim kalibrasi alat PKB dari Kementerian Perhubungan.
- b. Kegiatan: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- 1) Subkegiatan: Penetapan kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- Output subkegiatan ini berupa terlaksananya sosialisasi keselamatan berlalu lintas pada kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:
1. SMA 1 Salimpaung
 2. SMA 2 Sungai Tarab
 3. Kelompok Pemilik Kapal Tanjung Mutiara
 4. Sosialisasi kepada Satpam BRI, ADR Travel, Bank BSI terkait keamanan jalan Simpang Pelita Batusangkar.
 5. Kelompok Pemilik Kapal Tanjung Mutiara Bersama Balai Penyuluhan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan.
 6. Kelompok Masyarakat Nagari Koto Tuo pada TMMD.
 7. Kelompok Juru Parkir (Petir) pada Saat Operasi Ketupat dan Operasi Nataru tahun 2024.

8. Sosialisasi Keselamatan Angkutan sungai dan danau dalam rangka pengamanan Nataru tahun 2024.

Untuk subkegiatan pada tahun 2024 ini tidak ada biaya pendukung dikarenakan masuk ke dalam daftar refocusing anggaran.



Foto 3. Dokumentasi foto bersama saat sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan di SMA N 2 Sungai Tarab pada 30 Mei 2024

c. Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Subkegiatan: Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota.

Output subkegiatan ini berupa pengaturan lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar sehingga terpenuhinya pelayanan pengaturan dan pengamanan agenda pemerintah daerah, pengaturandan pengamanan rutin selama 12 bulan, Operasi Ketupat dan Operasi Nataru (Natal dan Tahun Baru).

d. Kegiatan: Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- 1) Subkegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

Output subkegiatan ini berupa:

- a) Terbayarkannya gaji 14 orang (THL) Juru Parkir pada lokasi titik parkir ditepi jalan umum sehingga dapat meningkatkan pelayanan perparkiran yang tertata dengan baik dan teratur.
- b) Sumber penerimaan pendapatan daerah berupa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

a. Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

- 1) Subkegiatan: Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C

Output subkegiatan ini berupa:

- a) pengelolaan terminal yang merupakan salah satu prasarana perhubungan yang terkelola dengan baik.
- b) Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 2022, terhitung 1 Januari 2024 Retribusi Jasa Usaha Terminal tidak lagi dipungut biaya.

Sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator Kinerja:

1. Persentase kendaraan angkutan umum dan barang yang layak jalan
(target kinerja = 75,00 %)

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Kendaraan yang melaksanakan pengujian Tahun 2024}}{\text{Jumlah Kendaraan yang wajib Uji (PKB) Tahun 2024}} \times 100 \% \\ &= \frac{5277}{7016} \end{aligned}$$

= 75,21

Capaian Kinerja : $\frac{75,21}{75,00} \times 100 = 100,28 \%$

Jumlah Kendaraan yang melaksanakan pengujian Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Kendaraan (unit)
1	Januari	376
2	Februari	383
3	Maret	466
4	April	336
5	Mei	461
6	Juni	410
7	Juli	295
8	Agustus	555
9	September	538
10	Oktober	567
11	November	413
12	Desember	477
	Jumlah	5.277

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (PKB) Tahun 2024

No	Jenis KBWU	Jumlah KBWU
1	Mobil Penumpang Umum-Oplet	23
2	Mobil Bus Seat 9-16 umum	147
3	Mobil Bus Seat 9-16 tidak umum	5
4	Mobil Bus Seat 17 ke atas Umum	104
5	Mobil Bus Seat 17 ke atas Dinas	8
6	Mobil Barang Pick Up Tidak Umum	2146
7	Mobil Barang Pick Up Dinas	5
8	Mobil Barang- Truck Umum	150
9	Mobil Barang- Truck Tidak Umum	513

10	Mobil Barang- Truck Dinas	4
11	Mobil Barang- Dump Truck Umum	83
12	Mobil Barang- Dump Truck Tidak Umum	145
13	Mobil Tangki	0
14	Mobil Barang- Box Umum	52
15	Mobil Barang- Box Tidak Umum	121
	total	3508
Jumlah= 2 x KIR dalam 1 tahun		2x3508 =7016

Target yang tertera di renstra khusus untuk sasaran ini pada perjanjian kinerja tahun 2024 adalah 95,50% diturunkan menjadi 75% dikarenakan kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat umumnya sudah membuka kembali Pengujian Kendaraan Bermotor.

Persentase kendaraan angkutan umum dan barang yang layak jalan tahun 2024 sebesar 75,21% sedangkan tahun 2023 sebesar 77,15 % mengalami penurunan sebesar 1,94 % Indikator ini menerangkan bahwa penyebab turunnya kendaraan yang telah melakukan KIR pada Dinas Perhubungan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi Pelayanan Publik, sehingga kendaraan yang bisa dilayani pengujian hanyalah kendaraan yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar, hal ini terkait keterbatasan anggaran untuk penyediaan kartu uji dan blangko uji. Pengujian Kendaraan Bermotor tidak melayani kendaraan yang berasal dari Luar Kabupaten Tanah Datar.

Pada tahun ini seksi PKB dalam melakukan Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor selalu memberikan himbauan berupa: Sosialisasi terkait dengan kelengkapan alat secara otomatis dan kecakapan tenaga penguji kepada masyarakat, untuk tidak ragu melakukan KIR kendaraannya 2 kali dalam 1 tahun pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.



Foto 4. Pengujian Kendaraan Bermotor

Permasalahan:

Pada seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) masih terdapat beberapa permasalahan antara lain:

1. Tingkatan level penguji pada seksi PKB baru pada level 3, hal ini diperlukan biaya untuk mengikuti diklat khusus penguji PKB.
2. Tidak adanya penyidik PPNS khusus untuk LLAJ sehingga Dishub Tanah Datar tidak bisa mengadakan pemeriksaan di jalan terkait angkutan umum dan barang yang bermasalah atau Over Load Over Dimensi (ODOL), sehingga menjadi salah satu penyebab angka kecelakaan tertinggi.

Solusi :

1. Agar Pemkab Tanah Datar melalui BKPSDM agar mengakomodasi biaya diklat penguji khusus untuk mencapai level 5 pada tahun 2025, sebagai persyaratan untuk mempertahankan akreditasi A. Biaya yang dibutuhkan untuk 1 orang penguji mengikuti diklat selama 1 bulan lebih kurang Rp 55.000.000,00 sedangkan tim

penguji PKB berjumlah 5 orang. Saran agar mengirim 1 penguji minimal 1 orang tiap tahunnya.

2. Untuk PPNS bidang Perhubungan tahun 2024 Pemkab Tanah Datar Sebaiknya Tim TAPD Kab. Tanah Datar untuk Tahun 2025 dapat memfasilitasi diklat yang dimaksud minimal untuk 2 (dua) orang.

2. Indek Kepuasan Masyarakat (target kinerja : Sangat Baik (95,40))

Indek Kepuasan Masyarakat terkait dengan Pelayanan Kendaraan Bermotor (PKB) melalui 150 responden diperoleh penilaian sebagai berikut:

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Nilai Rata-Rata	Nilai Tertimbang
U1	Persyaratan	758	3,790	0,379
U2	Prosedur	768	3,840	0,384
U3	Waktu Pelayanan	770	3,850	0,385
U4	Biaya/Tarif	774	3,889	0,389
U5	Produk Layanan	774	3,870	0,387
U6	Kompetensi Pelaksana	778	3,890	0,389
U7	Perilaku Pelaksana	781	3,905	0,391
U8	Maklumat Pelayanan	789	3,945	0,395
U9	Penanganan Pengaduan	792	3,960	0,396
U10	Unsur Pelayanan	776	3,880	0,388
	Rata-rata	97,049	3,882	

$$\text{Capaian Kinerja} : \frac{97,049}{95,40} \times 100 = 101,73 \%$$

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar pada Bulan Agustus 2024, secara umum capaian kinerja pelayanannya

masuk dalam kategori “ Sangat Baik “ dengan nilai interval konversi IKM antara 88,31 – 100,00 dengan kategori Sangat Baik (nilai 97,049).

Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya penyempurnaan pelayanan publik (public service) sudah selayaknya dilakukan secara terus menerus, secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Dengan capaian ini, pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan sudah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan unsur-unsur pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Diharapkan capaian ini tidak membuat terlena, namun justru menjadi tantangan untuk mempertahankan dan senantiasa melakukan perbaikan di segala unsur pelayanan.

Dalam rangka penguatan dan peningkatan beberapa unsure pelayanan yang dinilai kurang walaupun berdasarkan tanggapan responden sudah memiliki nilai mutu pelayanan kategori A dengan kinerja pelayanan “Sangat Baik” serta dalam mengoptimalkan unsur-unsur pelayanan lainnya, maka perlu diperhatikan dan diperbaiki beberapa unsur pelayanannya.

Dengan berpedoman pada temuan survey ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di

lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar. Beberapa rekomendasi langkah strategis tersebut antara lain:

- a. Diperlukan upaya untuk penguatan aspek Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan, komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi sikap, perilaku, keterampilan, kepekaan, kedisiplinan, hal ini dapat ditempuh melalui upaya ;
 1. Menerapkan dan mempedomani pedoman kode etik pegawai dalam rangka memotivasi petugas pelayanan terhadap nilai-nilai/standarisasi mengenai sikap layanan dan disiplin kerja dalam memberikan pelayanan;
 2. Penetapan kebijakan internal terkait pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan.
 3. Mengupayakan pembinaan peningkatan profesionalisme, keterampilan dan kemampuan pegawai secara berkala dan berkelanjutan di instansi terkait.
- b. Diperlukan upaya untuk penguatan aspek sistem, mekanisme dan prosedur, komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan, meliputi;
 1. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap layanan yang diselenggarakan (termasuk mekanisme pengaduan terhadap keluhan pelanggan), yang diinformasikan secara terbuka melalui media sosialisasi tertulis ataupun forum pertemuan diberbagai tingkatan masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi dari penyedia layanan.

2. Menerapkan dan mempedomani uraian tugas pegawai untuk meningkatkan aspek kejelasan, tanggungjawab dan kedisiplinan pegawai. Uraian tugas dipasang ditempat yang dapat dilihat oleh pengguna layanan.
- c. Diperlukan upaya untuk penguatan aspek sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja unit pelayanan melalui upaya ;
1. Penataan kembali ruang pelayanan, selain memudahkan pelanggan, langkah ini juga memudahkan petugas mau pun pihak Dinas untuk mensosialisasikan program-program pelayanan dengan lebih komprehensif, termasuk memindahkan maklumat pelayanan di tempat yang mudah terbaca.
 2. Pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana pelayanan yang ada. Jika memang membutuhkan, perlu pengadaan peralatan penunjang pelayanan.
 3. Peningkatan kenyamanan lingkungan dengan pemenuhan (kebersihan, keindahan, kesederhanaan, kelayakan, dan keamanan) untuk mendukung kinerja pelayanan.



Foto 5. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Permasalahan:

Ruang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) sampai saat ini masih dalam kondisi berlantai semen yang menyebabkan debu tebal menempel pada ruang uji KIR. Untuk memenuhi pelayanan publik sebaiknya diberi keramik untuk kenyamanan dan kesehatan pemeriksaan pengujian kendaraan bermotor.

Solusi:

Untuk tahun anggaran 2025 agar Tim TAPD dapat memfasilitasi Ruang Uji Kir Kendaraan

Inovasi:

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan memperoleh sertifikat dan piala Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Propinsi, Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam menyelenggarakan transportasi perkotaan dan pedesaan dan fasilitas publik dengan baik.

Dengan adanya IKU dengan Sasaran Strategis :Meningkatnya pelayanan perhubungan darat” Output dari kegiatan ini terdapat besaran Retribusi yang diperoleh pada Dinas Perhubungan. PAD yang berhasil dikumpulkan oleh Dinas Perhubungan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Retribusi	TARGET		REALISASI	
		2023	2024	2023	2024
1.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	540.000.000	540.000.000	543.902.000	626.778.000
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	600.000.000	0	477.583.400	0
3.	Retribusi Terminal	5.000.000	0	11.634.000	0

4	Retribusi Izin Trayek	5.000.000	0	3.205.000	0
	Total PAD	1.150.000.000	540.000.000	1.036.324.400	626.778.000

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa PAD tahun 2024 sebesar Rp 626.778.000,00 sedangkan PAD tahun 2023 sebesar Rp 1.036.324.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp 409.546.400 (34,66%).

Capaian kinerja sasaran 3:

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian %		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(10)
4. Predikat akuntabilitas Kinerja OPD	BB (71,00)	BB (72,50)	BB (72,00)	B (66,51)	B (68,80)	BB (70,60)	93,67	94,89	98,05

Sasaran III: Meningkatnya tata Kelola birokrasi yang akuntabel, telah dapat direalisasikan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Subkegiatan :Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

Output subkegiatan ini berupa tersedianya dokumen perencanaan yaitu DPA induk dan DPA Perubahan pada Dinas Perhubungan.

2) Sub kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output subkegiatan ini berupa tersedianya dokumen LKPJ dan LPPD, LKjIP pada Dinas Perhubungan.

b. Kegiatan: Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Subkegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output subkegiatan ini berupa dokumen pembayaran gaji dan dokumen pembayaran TPP ASN Dinas Perhubungan sebanyak 43 orang.

- 2) Subkegiatan: Koordinasi dan Penyesuaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Output subkegiatan ini berupa dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Semester Dinas Perhubungan realisasi keuangan

c. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Subkegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

Output subkegiatan ini berupa penyediaan komponen Instalasi/Penerangan Kantor untuk kelancaran tugas sehari-hari.

- 2) Subkegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Output subkegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor, kertas dan cover dengan realisasi keuangan sebesar

- 3) Subkegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Output subkegiatan ini berupa penyediaan kebutuhan kantor yang perlu dicetak dan seperti Map, blanko, kwitansi amplop dan lain-lain serta penyediaan biaya fotokopi dan jilid.

- 4) Subkegiatan: Fasilitas kunjungan Tamu

Output subkegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman rapat serta penyediaan makanan dan minuman untuk tamu yang datang ke Dinas perhubungan

- 5) Subkegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output subkegiatan ini berupa terlakannya perjalanan dinas biasa (dalam propinsi dan luar kabupaten) serta perjalanan dinas dalam

kota (dalam kabupaten) serta terealisasinya biaya perjalanan dinas sesuai yang dibutuhkan.

d. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Subkegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output subkegiatan ini berupa terbayarkannya gaji THL tenaga administrasi sebanyak 2 (dua) orang dan tersedianya materai dan biaya pengiriman paket pada Dinas Perhubungan

2) Subkegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output subkegiatan ini berupa tersedianya/terbayarkan tagihan listrik, air, telepon, internet tiap bulannya pada Dinas perhubungan

3) Subkegiatan: Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor

Output subkegiatan ini berupa tersedianya peralatan kebersihan untuk kebersihan dan kenyamanan kantor serta tersedianya gaji 1 (satu) orang THL tenaga kebersihan pada Kantor Perhubungan.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Output subkegiatan ini berupa terpeliharanya kendaraan operasional dinas yang didukung dengan BBM dan suku cadang kendaraan, terbayarkan pajak kendaraan operasional dinas dan KIR bus Sekolah serta terbayarkannya gaji 1 (satu) orang THL tenaga Supir pada Dinas Perhubungan

2) Subkegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Output subkegiatan ini berupa terpeliharanya kendaraan operasional dinas melalui service kendaraan secara berkala.

3) Subkegiatan :Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Output subkegiatan ini berupa terpeliharanya gedung kantor dinas perhubungan (cat pagar kantor) serta terbayarkannya gaji 1 (satu) orang THL tenaga keamanan kantor perhubungan

Sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator Kinerja:

a. Predikat akuntabilitas Kinerja OPD (Target Kinerja : BB(72,00))

	Indikator	Bobot	Nilai
1	perencanaan kinerja	30	24,40
2	pengukuran kinerja	30	18,60
3	pelaporan kinerja	15	10,50
4	evaluasi internal	25	17,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,60
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)

$$\text{Capaian Kinerja : } \frac{70,60}{72,00} \times 100 = 98.05 \%$$

Adapun tujuan evaluasi ini, menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran, dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Target Predikat Akuntabilitas OPD tahun 2024 adalah BB sedangkan capaian yang diperoleh pada tahun 2023 adalah “BB” hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman ASN terkait pemenuhan

dokumen penilaian SAKIP. Untuk itu Dinas Perhubungan mengupayakan agar sasaran 3 ini pada tahun 2024 tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Permasalahan

Masih rendahnya pelaporan kinerja dan evaluasi internal dinas sehingga menyebabkan rendahnya capaian kinerja pada penilaian akuntabilitas.

Solusi

Untuk meningkat item diatas harus ada dilaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi, dan pelatihan untuk dapat meningkatkan kompetensi SDM ASN Dinas Perhubungan dan peningkatan rapat evaluasi dan monitoring.

Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2023

a. Perencanaan Kinerja

Dinas Perhubungan telah mempunyai dokumen perencanaan Kinerja jangka menengah dan Jangka pendek dan telah didukung dengan perjanjian kinerja dari eselon II, III dan IV. Anggaran yang ditetapkan dalam DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yakni dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasi di PPID Kabupaten Tanah Datar

b. Pengukuran Kinerja

Telah dilakukan pengukuran dan pemantauan kinerja secara berkala, pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi). Namun masih ada yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja antara lain belum sepenuhnya menjadi

dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

c. Pelaporan Kinerja

Dinas Perhubungan Telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023, Laporan Kinerja telah menyajikan realisasi kinerja, telah diformalkan dan disampaikan tepat waktu. Namun ada beberapa hal yang diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain:

1. Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatan.
2. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi budaya kerja.
3. Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan pada website PPID Kabupaten Tanah Datar.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan teknologi informasi

Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar agar:

1. Hasil pengukuran kinerja agar dijadikan sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktur maupun fungsional.
2. Dokumen laporan Kinerja yang disusun dapat menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatan.

3. Mempublikasikan dokumen laporan kinerja pada website PPID Kabupaten Tanah Datar.

Tindakanlanjut Rekomendasi

1. Hasil pengukuran kinerja Dinas Perhubungan sudah dijadikan sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional terdapat pada aplikasi E-Kin MyASN yang sudah diupdate oleh ASN Dinas Perhubungan
2. Dokumen laporan Kinerja yang disusun dapat menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatannya ditindaklanjuti pada LKjIP tahun berikutnya.
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Perhubungan sudah menggunakan teknologi informasi yaitu <https://e-sakip.tanahdatar.go.id/signin/login>.

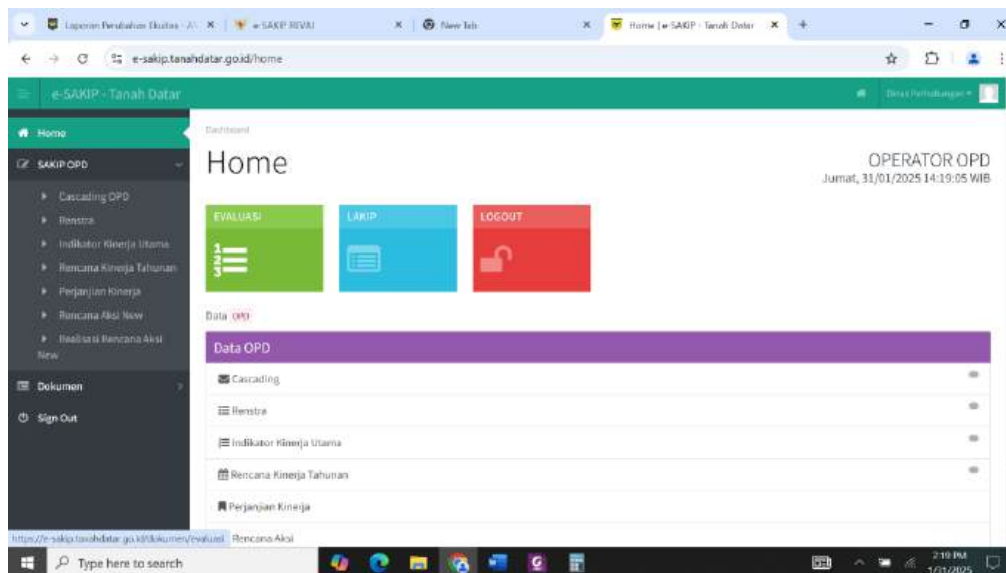


Foto 6. e-Sakip

4. Sudah mempublikasikan dokumen laporan kinerja tahun 2023 pada website PPID Kabupaten Tanah Datar.

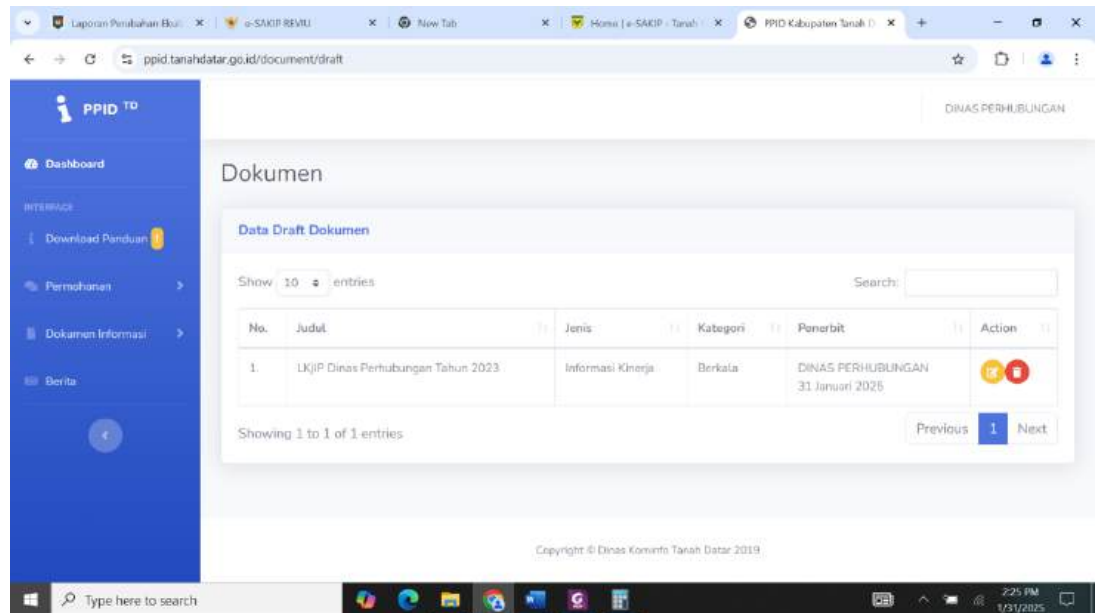


Foto e.7 aplikasi PPID

Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian %		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
5. Terwujudnya inovasi berkelanjutan	1	1	1	1	1	1	100	100	100

Sasaran IV: Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan, untuk Program dan Kegiatan yang mendukung tidak ada.

SIDISKA-PANGADU memasuki triwulan IV pada tahun ketiga yang di-Launching sejak bulan Oktober 2021. Pada triwulan IV tahun 2024 ini masih berlanjut berupa Sistem Informasi Dishub Terbuka Pengaduan PJU yang dilaksanakan oleh tim inovasi SIDISKA PANGADU Dishub Tanah Datar berupa pengelolaan, mengoperasionalkan, dan mengontrol pelaksanaan penyebaran informasi seputar kegiatan Dinas

Perhubungan Kabupaten Tanah Datar sehari-hari berupa Informasi dan data disampaikan secara luas kepada masyarakat secara online. Sekaligus sebagai media Pengaduan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Di triwulan IV penyebaran informasi dan data secara terbuka berjalan dengan baik. Inovasi tersebut diintegrasikan juga dengan memanfaatkan Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, LPP RADIO LUHAK NAN TUO 102.5 FM yaitu dengan melanjutkan penyiaran imbauan atau Iklan Layanan Masyarakat atau ILM seputar Peraturan Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta himbauan Pimpinan Daerah/Bupati terkait Transportasi Berkeselamatan.

Platform media digital di Media Sosial atau media online yang dijalankan yaitu sebagai berikut:

1. Website: www.dishub.tanahdatar.go.id
2. Instagram: Pe_Moda dinasperhubungan, info lalintd
3. Facebook: Pe_Moda dinasperhubungan.

Seluruh administrasi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh Surat-Surat Sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Dinas Nomor 500.11.3.1/74/Dishub-2024 tentang Penetapan Nama Inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar tanggal 5 Februari 2024
2. Keputusan Kepala Dinas Nomor 500.11.3.1/75/Dishub-2024 tentang Penunjukkan Anggota Tim pelaksana SIDISKA PANGADU tanggal 5 Februari 2024
3. 3. Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 500.11.3.1/161/Dishub-2024 tanggal 7 Mei 2024 yang melibatkan

personil dari Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung secara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Rapat-rapat tim atau briefing untuk membahas poin-poin rencana konten terus dilaksanakan. Konten yang akan diupload selalu disaring Tim terlebih dahulu dan jika ada permasalahan selalu dibahas dengan Kepala Dinas.

Untuk mendukung Sidiska Pangadu berperan di masyarakat maka Tim Kreatif SIDISKA PANGADU membuat inovasi dengan upload Laporan atau konten terkini terkait situasi dan kondisi laporan pandangan mata lalu lintas di masing masing lokasi terkait jalan-jalan atau jembatan yang rusak akibat bencana alam yang dalam proses perbaikan. Terkait liburan Natal dan Tahun Baru yang juga merupakan liburan sekolah, Dinas Perhubungan ikut berkontribusi dalam Posko Pengamanan Natal dan Tahun Baru bersama stakeholder terkait bergabung bersama personil dari Polres Tanah Datar, Kodim 0307 Tanah Datar, Dinas Kesehatan, Satpol PP Damkar. Untuk Posko Pengaman Natal dan Tahun Baru tahun 2024 terdapat 4 posko yang berada di wilayah hukum Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari :

1. Posko Pengamanan Taman Cindua Mato
2. Posko Pengamanan Istano Pagaruyung
3. Posko Pengamanan Wisata Air Tanjung Mutiara bergabung dengan Satuan Pelayanan atau SATPEL Singkarak BPTD Kelas II Sumatera Barat.
4. 4. Posko Pengamanan Lembah Anai

Selain mempunyai 3 platform digital di atas, Si-Diska Pangadu juga melanjutkan atau meneruskan Info dari Instagram rekan Bidang Lalin dan Angkutan yaitu info_lalintd. Info Lalin TD ini adalah instagram khusus

petugas lapangan dan terintegrasi dengan Si_Diska Pangadu. Inovasi SIDISKA PANGADU akan terus dilanjutkan untuk tetap berjalan dengan baik ke depan.

Untuk tahun 2025 direncanakan sebuah inovasi baru dengan nama Si-Petir (Sistem Informasi Pelayanan Terminal dan Parkir yang akan mengelola informasi dan data data yang dapat dikonsumsi masyarakat terkait Perhubungan secara umum dan Terminal dan Parkir khususnya. Secara digital akan ditayangkan pada website Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar www.dishubtanahdatar.go.id

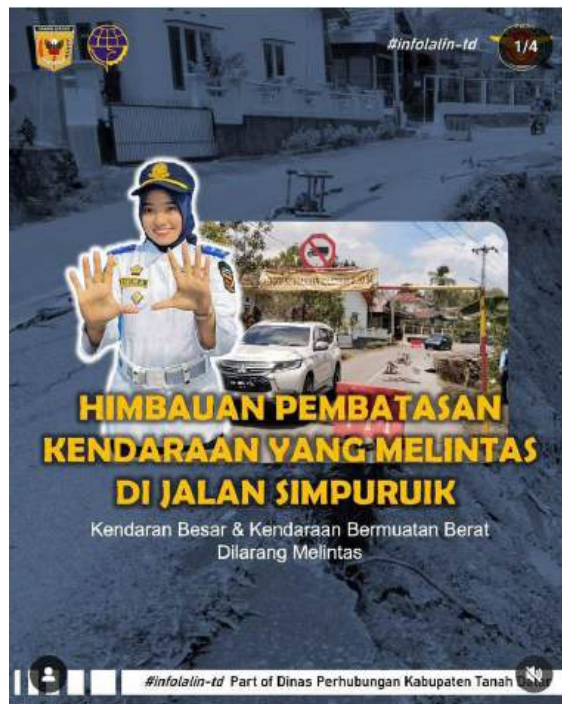


Foto 8. Info lalintd

Sasaran 4

Target : 1 inovasi Si-Diska (Sistem Informasi Dishub Terbuka)

Realisasi : 1 Inovasi

Capaian Kinerja : $\frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$

1

Permasalahan

1. Tidak tersedianya *gadget* sebagai aset untuk mendukung kegiatan inovasi sehingga petugas inovasi dishub memakai *gadget* pribadi yang menjadikan inovasi tidak terlaksana maksimal

Solusi:

1. Menganggarkan belanja peralatan dan mesin (*gadget*) pada renja tahun 2026.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN/REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Program Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasai Rp	Capaian %
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	➤ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Subkegiatan: a) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	13.484.518.743 286.300.000 12.236.817.650	12.332.190.166 269.835.999 12.006.994.907	91.45 94.25 98,12
II	Meningkatnya pelayanan Perhubungan Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Kegiatan: Pengujian kendaraan Bermotor Subkegiatan: a. Penyediaan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. Kegiatan: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Subkegiatan: Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 3. Kegiatan: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	680.834.510 79.635.900 25.000.000 120.262.310	668.611.588 77.224.250 24.812.500 119.817.156	98,20 96.97 99,25 99.63

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkegiatan:	212.240.000	159.193.950	74,95
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.500.000	3.300.000	94,29
		b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.364.400	28.363.400	99,99
		c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
4.	Terwujudnya Inovasi berkelanjutan	-	-	-	-
		Jumlah	18.597.986.802	17.979.286.302	96,67

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 telah dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2024 anggaran belanja sebesar Rp 18.597.986.802,- sedangkan di tahun 2023 sebesar Rp 18.824.578.939,- terjadi penurunan anggaran sebesar 1,20 % dikarenakan adanya refocusing anggaran pada Dinas perhubungan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar disusun sebagai satu kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perhubungan telah menyelesaikan LKjIP Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi, tujuan dan sasaran strategis dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar telah dapat berjalan dengan baik.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
3. LKjIP tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 – 2026.

B. SARAN

1. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) diharapkan masing-masing Bidang dapat mempedomani dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026.
2. Untuk masa akan datang diperlukan beberapa poin penting:
 - a. koordinasi dengan tim teknis perlu ditingkatkan.

- b. Melaksanakan studi tiru dengan tujuan mengadopsi kebijakan di bidang perhubungan yang sesuai dengan renstra Dinas Perhubungan.